BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat potensial. Pendapatan dari pajak menjadi bagian penting dalam anggaran negara dan berfungsi sebagai alat untuk membiayai kebutuhan negara. Karenanya, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini. setiap tahunnya. Sumber penghasilan pajak mencakup berbagai jenis perpajakan, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan serta memberikan kontribusi besar untuk pendapatan daerah jika dibandingkan sektor pajak lainnya yang ada. Sebagai salah satu jenis pajak properti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan (Binawati et al., 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran penting bukan hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan hampir semua aktivitas masyarakat dengan bumi dan bangunan, menjadikan masalah PBB sangat sensitif bagi banyak orang. Setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan target penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun seringkali target tersebut tidak tercapai sepenuhnya, bahkan terkadang hasil penerimaannya jauh lebih rendah dari yang diharapkan (Arifin et al., 2023).

Pada Kota Surabaya yang memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Pada tahun 2024, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Surabaya mencapai sekitar 78% dari target total Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,6 triliun, meskipun masih ada kekurangan sekitar 22% hingga akhir tahun 2024. Namun, hasil tersebut belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan di Surabaya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk segera membayar pajak bumi bangunannya karena pajak ini memiliki peranan besar dalam mendukung kemajuan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Salah satu faktor yang mendukung pembangunan adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Kominfo Jatim, 2024).

Pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Istiqomah & Sandari (2024), kepatuhan wajib

pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mematuhi, memenuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat pentingnya peran kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) sangat diperlukan upaya untuk terus menumbuhkan nilai kepatuhan di kalangan wajib pajak serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya (Baok et al., 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Andriani & Kumala (2022) menyatakan pada penelitiannya bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan beberapa di antaranya adalah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Selain itu, penelitian Santoso & Djati (2021) mengungkapkan bahwa faktor sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang terlalu berat, bukannya mendorong kepatuhan justru menambah beban bagi wajib pajak. Situasi ini dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan pembayaran dikarenakan sanksi yang bertambah terus-menerus. Oleh karena itu, agar wajib pajak tidak dikenakan sanksi pajak segera dalam melakukan pembayaran sesuai jadwalnya dan tidak dalam masa jatuh tempo.

Faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satunya dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Berdasarkan penelitian Ekawati & Subadi (2020), tujuan sanksi adalah mengarahkan masyarakat agar mematuhi norma yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak memiliki korelasi positif melalui pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik mendorong wajib pajak lebih memutuskan untuk melunasi pajak tepat waktu guna menghindari sanksi denda (Chalid, 2021). Dalam mengatasi permasalahan terhadap denda pemerintah Kota Surabaya telah meluncurkan program penghapusan sanksi pajak untuk tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1994 hingga 2024. Program ini bertujuan mendorong warga memenuhi kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dan mempercepat pencapaian target Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai inovasi pembayaran sebagai langkah dalam peningkatan pembayaran pajak seperti layanan online melalui platform e-commerce dan gerai ritel yang mempermudah masyarakat dalam membayar PBB (Al Farisi dan Aisyaturahmi, 2022).

Permasalahan-permasalahan tersebut melatarbelakangi laporan ini dimana dalam kegiatan magang penulis mendapatkan pembelajaran hal baru terkait strategi peningkatan yang akan diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) UPTB 2 terhadap faktor-faktor yang

melemahkan pembayaran PBB. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Bapenda UPTB 2 Surabaya.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan daripada kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pengetahuan dan teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke praktik kerja nyata.
2. Mempelajari pelaksanaan tata kerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, serta pengenalan gambaran umum instansi dan pemahaman tentang budaya organisasi, juga pemahaman permasalahan yang muncul serta penanganan penyelesaian di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
3. Mempersiapkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja profesional setelah lulus.
4. Mengukur kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, mendiskusikan, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
5. Menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan sikap profesional dalam bertugas, untuk menambah pengalaman sebagai persiapan sebelum memasuki dunia kerja.

1.3. Manfaat Magang

Manfaat daripada pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a. Program magang berperan penting dalam memperkuat hubungan antara Universitas dengan mitranya, memfasilitasi komunikasi antara Universitas dengan kehidupan pekerjaan. Membuka peluang bagi peningkatan dan keselarsan kurikulum dengan tuntutan dunia kerja.
 - b. Magang mitra memberikan evaluasi kepada Universitas mengenai seberapa jauh kurikulum yang diterapkan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk karier. Ini menjadi evaluasi dalam memperbaiki program pendidikan yang diterapkan.
2. Bagi Mitra Magang
 - a. Mendorong kolaborasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat.
 - b. Memberikan masukan pemikiran dan bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan pajak.

3. Bagi Penulis/Mahasiswa

- a. Sebagai persiapan untuk menghadapi dunia kerja yang kompetitif dan dinamis, sehingga ketika lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa sudah memiliki bekal dan gambaran tentang dunia kerja. Dengan demikian, mereka tidak merasa asing dan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan serta lingkungan kerja.
- b. Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah serta keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja dan mempelajari hal-hal baru di lingkungan magang.

1.4. Tujuan Penulisan Topik Magang

Tujuan penulisan topik magang dengan mengambil topik tentang peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Bapenda UPTB 2 Surabaya adalah untuk mengidentifikasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan potensi penerimaan dari PBB melalui pendekatan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga untuk mendukung tujuan tersebut, penulis akan menjelaskan bahwa Bapenda UPTB 2 melakukan kegiatan mobil keliling yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui mobil keliling ini, Bapenda UPTB 2 Surabaya juga menyediakan program pengurangan denda sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Program pengurangan denda ini menjadi jalan alternatif bagi wajib pajak untuk melakukan keberatan denda dengan melakukan pengajuan melalui pengisian formulir kepada petugas Bapenda UPTB 2 pada kegiatan mobil keliling, walaupun pemerintah Kota Surabaya sering mengadakan program pembebasan denda tidak menutup kemungkinan wajib pajak tertinggal oleh program tersebut karena program pembebasan denda hanya berlangsung di waktu tertentu saja seperti hari ulang tahun Kota Surabaya.